



**EoF menghimbau SMG / APP, dan APRIL
untuk menepati janji mereka:
Jangan ada lagi konversi hutan alam dan pembukaan
lahan gambut untuk menghasilkan pulp
Jangan ada lagi pelanggaran komitmen iklim Negara**



Diterbitkan November 2010

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau,

Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>

Email: eof@eyesontheforest.or.id

Latar belakang

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca hingga 41% dibandingkan tingkat bisnis seperti biasanya hingga 2020 dengan fokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut tropis. Menteri Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sejak ia diangkat pada November 2009, ia "belum menandatangani satu izin pun bagi perusahaan untuk mengkonversi hutan alam atau lahan gambut"ⁱ. Pada tanggal 26 Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter of Intent untuk membentuk kemitraan agar "berkontribusi pada pengurangan signifikan dalam emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut"ⁱⁱ. Norwegia berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya ini dengan mengucurkan dana satu miliar dollar AS.

Bagaimanapun, Laporan Investigasi Eyes on the Forest bulan Juli 2010^{iii, iv} dan bukti-bukti foto^v menyingkap bahwa dua perusahaan raksasa pulp dan kertas - Asia Pulp & Paper milik Sinar Mas Group (SMG / APP) yang berkantor pusat di Shanghai/Cina dan Asian Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) milik Raja Garuda Mas Grup yang berkantor pusat di Singapura - terus mengkonversi hutan alam dan gambut dalam di propinsi Riau, Sumatera. Riau menjadi provinsi Indonesia dengan emisi Gas Rumah Kaca tertinggi dan salah satu kandidat untuk menjadi provinsi percontohan REDD+ dalam perjanjian Indonesia-Norwegia.

Laporan EoF Juli 2010 mendokumentasikan pembukaan hutan alam berskala besar oleh SMG / APP dan APRIL yang menentang kebijakan kesinambungan mereka sendiri yang telah diterbitkan dan komitmen kepada pembeli, investor dan masyarakat umum untuk melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, habitat spesies langka dan iklim. Tindakan mereka juga mengganggu komitmen Presiden kita dalam mengurangi emisi karbon Indonesia. Mereka merusak komitmen Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup satwa harimau yang terancam punah di Tahun Harimau ini. "Deforestasi yang direncanakan" ini dimungkinkan oleh izin penebangan tahunan (Rencana Kerja Tahunan / RKT), yang disetujui oleh Menteri Kehutanan sebelumnya pada tahun 2009, menyusul penghentian penyelidikan polisi terhadap pembalakan liar oleh industri pulp yang mengherankan (Laporan Investigasi EoF April 2010^{vi}, Laporan Investigasi EoF Juli 2010).

Pada tanggal 2 Juli 2010, Media Indonesia melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan mengeluarkan "17 RKT baru" untuk menebangi hutan alam di Riau. Dalam laporan investigasi ini, Eyes on the Forest menyelidiki lokasi dari izin yang dikeluarkan ini untuk menilai dampak negatif mereka guna memperingatkan orang-orang yang mampu bertindak menghentikan RKT agar tidak dilaksanakan.

Foto Halaman Depan: pemuatan kayu hutan alam di konsesi yang berafiliasi dengan APP, PT. Bina Daya Bentara (No. 10 di Peta 1 dan Tabel 1), di blok hutan gambut Libo, rumah bagi gajah Sumatera dan harimau, berada pada lahan gambut, kedalaman lebih dari 4 meter. Lokasi GPS: 0,37 N1011'3 "; E100o52'38 0,10", 24 Mei 2010.

Pengajuan dan Persetujuan 18 Izin RKT Baru untuk Membuka Gambut dan Menebangi Hutan Alam sebagai Pelanggaran Langsung terhadap Tekad Iklim dan Konservasi Keanekaragaman Hayati oleh Perusahaan dan Pemerintah

Eyes on the Forest menyusun rincian perizinan RKT 18 baru yang dikeluarkan oleh Direktur Pengembangan Hutan Tanaman di Kementerian Kehutanan Indonesia (Peta 1 dan Tabel 1). Izin tersebut diterbitkan terakhir pada 10 Mei 2010. Rupanya, Menteri bersangkutan tidak diberitahu tentang terbitnya izin-izin ini atau konsekuensi lingkungan ketika ia memberikan pernyataan bahwa ia "tidak menandatangani satupun izin bagi perusahaan untuk mengkonversi hutan alam atau lahan gambut." ^{vii}

Izin RKT memungkinkan perusahaan untuk membuka lahan gambut dan membatat hutan alam di dalam konsesi mereka. Kayu yang ditebang, dinamakan kayukeras tropis campuran (MTH), digunakan untuk menghasilkan pulp untuk kertas.

Sebelas perusahaan yang berafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP) milik Sinar Mas Group (SMG) dan enam perusahaan dengan Asian Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) milik Raja Garuda Mas Group (RGM)). SMG/APP dan APRIL terlihat kompleks, sarang-sarang berdekapan dari perusahaan yang terlibat dalam bisnis pulp & kertas dari kelompok Sinar Mas dan RGM, yang berkantor pusat di Shanghai dan Singapura, masing-masingnya.

Banyak perusahaan dan konsesi yang mempunyai RKT baru yang telah disetujui juga memiliki RKT tahun 2009 dan tengah beroperasi. Operasi-operasi mereka akan terus menciptakan dampak negatif yang sama sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan-laporan EoF sebelumnya^{viii}. Berdasarkan analisis EoF RKT 2010 menyimpulkan bahwa:

- 112.914 hektar hutan alam di Provinsi Riau akan ditebang untuk menghasilkan 10,4 juta kubik meter kayu MTH, sebagian besar untuk produksi pulp (Tabel 1). Seperti pada tahun 2009, kedua perusahaan diperbolehkan untuk menebang yang sekitar 5% lainnya dari hutan alam yang tersisa di Riau^{ix}, satu kawasan seluas hampir dua kali kota metropolitan Jakarta.
- 14 dari 18 izin RKT yang diajukan oleh SMG / APP dan APRIL dan Kementerian Kehutanan telah menyetujuinya berada pada gambut berkedalaman lebih dari 3 meter. Sekitar 90% dari kawasan hutan alam dimana lisensi RKT yang baru membolehkan penebangan ada pada lahan gambut, kebanyakan lahan gambut berkedalaman lebih dari 4 meter (Peta 1). Izin-izin RKT ini seharusnya tidak pernah diterbitkan karena hutan alam pada gambut lebih dari 3 meter dilindungi dengan Keputusan Presiden Nomor 32/1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 dan UU Nomor 26/2007.
- Sebagian besar hutan alam yang dibolehkan oleh izin RKT baru untuk ditebangi memiliki kanopi rimbun (foto dan gambar satelit disediakan di bawah ini). Hutan alam yang akan ditebang habis oleh SMG / perusahaan APP dan APRIL berafiliasi memiliki rata-rata hasil kayu 95 meter kubik/hektar dan 90 meter kubik/ha (Tabel 1). Bahkan dengan asumsi bahwa hasil yang terdaftar rendah adalah benar dan tidak disengaja di bawah perkiraan mereka menunjukkan hutan alam yang bagus dengan emisi CO₂ yang signifikan jika ditebangi atau memiliki potensi besar untuk menyimpan dan melindungi CO₂ jika dilindungi.

- Kedua pembukaan hutan alam dan pengeringan gambut yang dalam untuk menghasilkan pulp merusak komitmen global Presiden untuk mengurangi emisi negara di sebagian besar LULUCF dan pembukaan gambut yang terkait dengan emisi GRK hingga lebih dari 41%^x.
- Sebagian besar hutan alam yang dibuka di bawah izin RKT yang baru, baik diidentifikasi sebagai Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) menurut multi stakeholder didukung oleh HCV Toolkit Indonesia dan/atau berada di dalam Cagar Biosfer UNESCO Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang baru saja dibentuk, dan/atau yang diakui secara internasional yakni Lansekap Konservasi Harimau^{xi} penting di Bukit Tigapuluh, Semenanjung Kampar, Kerumutan dan Senepis-Buluhala. Pembukaan hutan alam tersebut jadi pelanggaran komitmen publik terhadap keberlanjutan secara gamblang oleh kedua perusahaan, SMG / APP dan APRIL, maupun terhadap iklan berulang-ulang mereka yang memuji dugaan prestasi "hijau" mereka sendiri yang tidak terwujud. Pada 18 November, para pakar terkemuka serta anggota Komisi Ilmuwan UNEP/UNESCO GRASP menandatangani surat kepada Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Norwegia guna menekankan "perlunya perlindungan terhadap hutan bernilai konservasi tinggi yang ditebangi selain terhadap 'hutan primer' belum ditebangi sebagai bagian dari Letter of Intent Indonesia-Norwegia^{xii}
- Beberapa perusahaan memperoleh izin RKT untuk membuka hutan alam sementara badan pemerintah lainnya sedang menyelidiki masalah korupsi mengenai legalitas dan izin yang dikeluarkan kepada perusahaan terafiliasi dengan mereka.
- Perusahaan tersebut akan menebangi hutan alam pada tiga dataran rendah di pulau-pulau kecil dengan kepentingan strategis di lepas pantai timur Sumatera: Pulau Rangsang, Pulau Rupat dan Pulau Tebing Tinggi.

SMG/APP dan APRIL Berbohong pada Pembeli tentang Penggunaan Hutan Alam

Pelumatan hutan alam Riau yang terus berlanjut merupakan pelanggaran langsung terhadap komitmen publik yang dibuat oleh SMG/APP dan APRIL untuk memastikan pembeli kertas global mereka akan kesinambungan mereka^{xiii}. Selama bertahun-tahun, perusahaan mengutip Keputusan Menteri tahun 2004 untuk menghentikan izin konversi hutan alam setelah 2009 dan mengiklankan kebijakan perusahaan mereka untuk tidak lagi melumat hutan alam hingga tahun 2007 (SMG/APP) dan 2009. (APRIL)^{xiv}.

Namun, izin RKT baru membolehkan penebangan dengan volume sangat besar untuk kayu keras tropis campuran (Mixed Tropical Hardwood) di konsesi-konsesi ("target produksi" dari pohon KBS [menengah] dan KBK [kecil] di Tabel 1) mengindikasikan kebutuhan yang besar kedua pabrik olah pulp perusahaan terhadap kayu itu:

- Perusahaan-perusahaan afiliasi SMG/APP akan menebangi 41.789 hektar untuk memasok 3.622.494 meter kubik kayu bulat sedang dan kecil untuk pabrik pulp SMG/APP, mendekati 30% dari kebutuhan kayu serat pabrik yang dihitung dengan kapasitas pulp terpasang 2 juta ton / tahun.
- Perusahaan-perusahaan afiliasi APRIL akan menebangi 71.125 hektar untuk memasok 6.282.010 meter kubik kayu bulat sedang dan kecil untuk pabrik

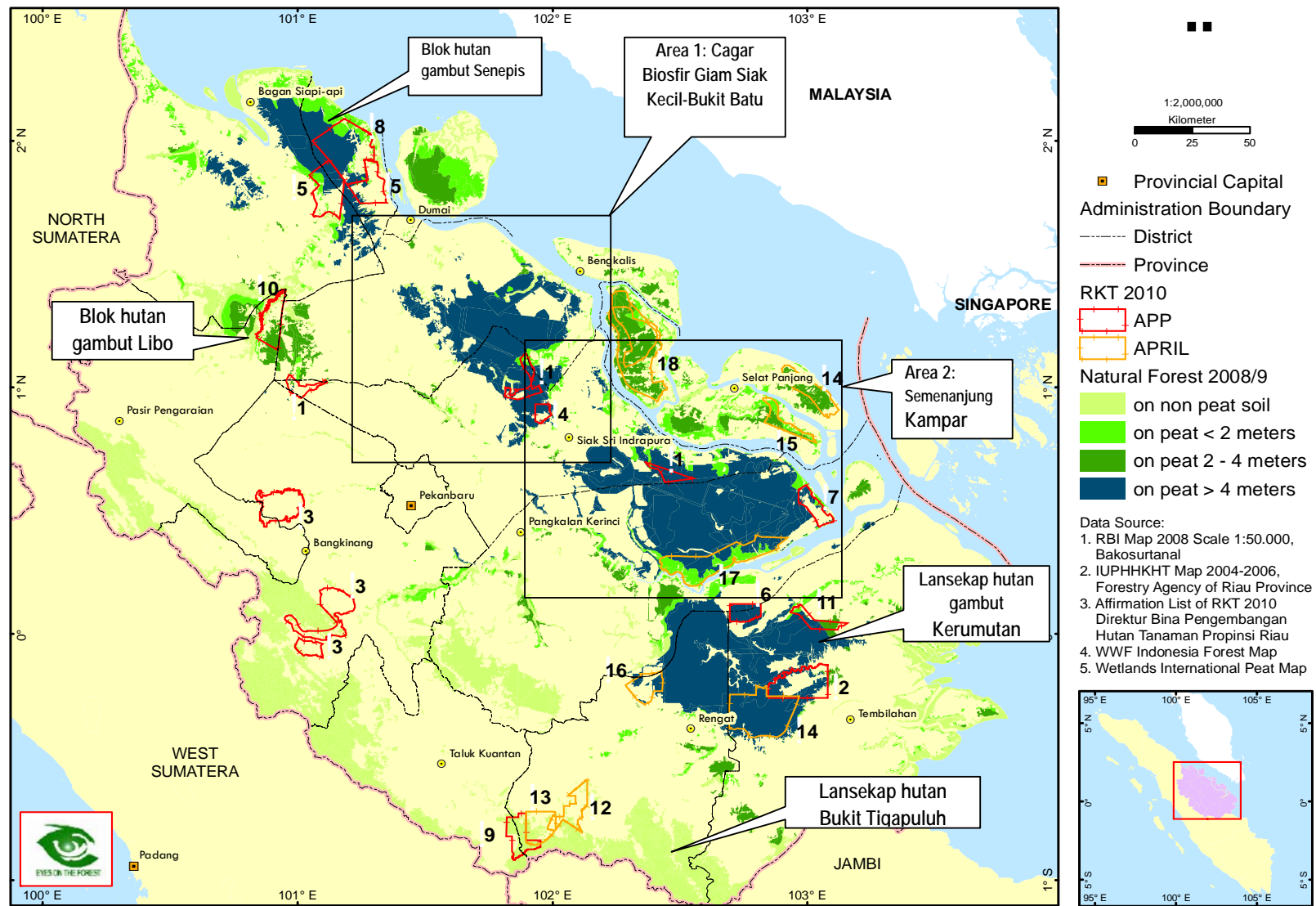
pulp APRIL, hampir 50% dari kebutuhan kayu serat pabrik dihitung dengan kapasitas pulp terpasang 2 juta ton/tahun.

Data tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa kedua perusahaan tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan operasi hutan tanaman lestari profesional yang tidak bergantung pada pembukaan hutan alam dan pembukaan lahan gambut untuk perluasan pabrik yang pernah mereka lakukan.

Eyes on the Forest menghimbau SMG / APP dan APRIL untuk menghentikan penebangan hutan alam segera, dan secara tetap.



Foto a—Penebangan hutan alam di konsesi afiliasi APP/SMG, PT. Suntara Gaja Pati (No. 8 di Peta 1 dan Tabel 1) di blok hutan gambut Senepis, rumah bagi harimau Sumatera, berada pada puncak gambut berkedalaman lebih dari 4 meter. Lokasi GPS: N1°56'56 0,88 "; E101 0,80 o 13'6", pada 29 Juli 2010.



Peta 1. Konsesi HTI yang izin RKT diterbitkan pada 2010 dengan hutan alam yang tersisa di 2008 / 9 di lahan gambut atau bukan gambut tidak kurang dari 2 meter, 2 - 4 meter atau lebih dari kedalaman 4 meter. Lokasi Wilayah 1 dan 2 yang ditandai dengan kotak hitam.

No. on Map 1	Company name	Number and date of decree letter on RKT Legalization	Production target					Peat?
			Natural forest allowed to be cleared according to RKTs					
			Area (Ha)	Log (m ³)				
				KB (>50 cm)	KBS (30-49 cm)	KBK	Total	
A. APP affiliated companies								
1	PT. Balai Kayang Mandiri	SK. 22/BPHT-3/2010, 28 April 2010, Siak	6,104	16,900	66,350	231,380	314,630	YES
2	PT. Bina Duta Laksana	SK. 11/BPHT-3/2010, 24 Maret 2010, Indragiri Hilir	1,844	16,210	38,760	110,350	165,320	YES
3	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	SK. 39/BPHT-3/2009, 31 Desember 2009, Kampar	1,182	3,161	6,369	26,960	36,490	
4	PT. Rimba Mandau Lestari	SK. 19/BPHT-3/2010, 28 April 2010, Siak	130	950	4,960	9,910	15,820	YES
5	PT. Ruas Utama Jaya	SK. 21/BPHT-3/2010, 28 April 2010, Rokan Hilir	3,865	12,980	41,920	158,390	213,290	YES
5	PT. Ruas Utama Jaya	SK. 21/BPHT-3/2010, 28 April 2010, Dumai	2,776	35,010	73,780	218,670	327,460	YES
6	PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang	SK. 12/BPHT-3/2010, 24 Maret 2010, Indragiri Hilir dan	4,345	43,370	164,570	505,800	713,740	YES
7	PT. Satria Perkasa Agung Serapung	SK. 17/BPHT-3/2010, 25 Maret 2010, Pelalawan	1,822	10,370	29,940	91,800	132,110	YES
8	PT. Suntara Gaja Pati	SK. 18/BPHT-3/2010, 26 Maret 2010, Dumai	6,356	61,980	161,840	558,995	782,815	YES
9	PT. Artelindo Wiratama	SK. 15/BPHT-3/2010, 25 Maret 2010, Indragiri Hulu	3,456	62,420	93,870	222,620	378,910	
10	PT. Bina Daya Bentala	SK. 22/BPHT-3/2010, 28 April 2010, Rokan Hulu	4,603	43,790	138,210	290,980	472,980	YES
11	PT. Riau Agro Palma	SK. 13/BPHT-3/2010, 25 Maret 2010, Indragiri Hilir	5,306	32,020	103,050	273,020	408,090	YES
APP TOTAL			41,789	339,161	923,619	2,698,875	3,961,655	
B. APRIL affiliated companies								
12	PT. Bukit Batabuh Sei Indah	SK. 07/BPHT-3/2010, 18 Februari 2010, Indragiri Hulu	2,406	-	340	21,060	21,400	
13	PT. Citra Sumber Sejahtera	SK. 16/BPHT-3/2010, 25 Maret 2010, Indragiri Hulu	4,864	950	9,180	88,480	98,610	
14	PT. Sumatera Riang Lestari	SK. 08/BPHT-3/2010, 24 Maret 2010, Indragiri Hilir	9,382	18,910	140,000	819,840	978,750	YES
14	PT. Sumatera Riang Lestari	SK. 23/BPHT-3/2010, 10 Mei 2010, Kepulauan Meranti	11,013	27,400	133,180	795,620	956,200	YES
15	PT. Lestari Unggul Makmur	SK. 24/BPHT-3/2010, 10 Mei 2010, Kepulauan Meranti	4,514	13,460	93,000	350,840	457,300	YES
16	PT. Mitra Kembang Selaras	SK. 14/BPHT-3/2010, 25 Maret 2010, Indragiri Hulu	2,436	4,450	43,390	302,120	349,960	YES
17	PT. RAPP	SK. 10/BPHT-3/2010, 24 Maret 2010, Pelalawan	21,799	41,420	221,590	2,000,950	2,263,960	YES
18	PT. RAPP	SK. 09/BPHT-3/2010, 24 Maret 2010, Kepulauan Meranti	14,711	24,520	172,790	1,089,630	1,286,940	YES
APRIL TOTAL			71,125	131,110	813,470	5,468,540	6,413,120	
APP AND APRIL TOTAL			112,914	470,271	1,737,089	8,167,415	10,374,775	

Tabel 1. RKT 2010 dikeluarkan untuk perusahaan afiliasi SMG/APP dan perusahaan afiliasi APRIL di hutan alam yang tersisa pada 2008/9 di Provinsi Riau oleh Direktur Pengembangan Hutan Tanaman di Kementerian Kehutanan. Produksi target dari penebangan hutan alam dibedakan untuk kayu besar (KB = Kayu Bulat Besar), kayu menengah (KBS = Kayu Bulat Sedang) dan kayu kecil (KBK = Kayu Bulat Kecil). KB digunakan untuk kayu lapis atau kayu produksi gergajian. KBS dan KBK digunakan untuk produksi pulp.

SMG/APP dan APRIL serta Perubahan Iklim

Cara bagaimana masalah perubahan iklim ditangani di Provinsi Riau adalah dengan membuat atau memecahkan persoalan pengembangan strategi REDD nasional untuk Indonesia, dengan empat alasan utama:

1. Riau memiliki angka kehilangan hutan alam tertinggi di seluruh Indonesia dan emisi terkait di dalam beberapa tahun terakhir.
2. Riau memiliki tingkat degradasi tanah gambut tertinggi dan emisi terkait dalam beberapa tahun terakhir.
3. Riau memiliki volume lahan gambut tertinggi di Indonesia dan merupakan kawasan kedua terbesar hutan alam di Sumatera.
4. Banyak hutan alam yang hilang dan degradasi lahan gambut di Riau "telah direncanakan atau merupakan deforestasi legal" yang akan mudah untuk berhenti jika pemerintah memiliki kemauan untuk melakukannya.

Jika Pemerintah gagal mengatasi masalah perubahan iklim di Riau, maka tipis kemungkinan bahwa masyarakat internasional, termasuk investor potensial pada proyek terkait REDD+ akan mempercayai strategi REDD nasional. Selain itu, industri bubur kertas dan kertas, termasuk SMG/APP dan APRIL, tengah berekspansi ke kawasan-kawasan lain di Indonesia dan agaknya menularkan persoalan-persoalan yang sama^{xv}.

Selama bertahun-tahun perusahaan-perusahaan afiliasi SMG/APP dan APRIL telah melakukan pembukaan lahan gambut dalam dan pembukaan hutan alam di Riau dengan izin dari Kementerian Kehutanan. Izin-izin dikeluarkan untuk dua perusahaan pada tahun 2009 dan 2010 sehingga mereka terus dibolehkan membuka lahan gambut dan menebangi hutan gambut alam yang tersisa di dalam Cagar Manusia dan Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil-Bukit Batu, dan blok-blok hutan gambut Semenanjung Kampar, Kerumutan, Senepis dan Libo (*Peta 1*).

Hutan lahan gambut Libo sekarang hampir "punah", hanya kepingan-kepingan hutan alam yang tersisa. Sejarah kematian Libo memberikan prospek yang menyedihkan bagi blok hutan lain yang masih tersisa di Riau yang berada di jalan yang sama menuju kepunahan tanpa ada titik akhirnya. Libo adalah rumah bagi lebih dari 100 kawanan gajah; di tahun 2006 banyak satwa yang tewas akibat hilangnya habitat dan mengakibatkan konflik dengan para perambah dan manajer perkebunan^{xvi}. Dengan kematian gajah-gajah langka Libo, bekas hutan yang pernah luar biasa bagus yang kini menjadi satu luka di lahan gambut yang memiliki jaringan padat dari kanal-kanal yang dibuka dan mengakibatkan emisi Gas Rumah Kaca besar-besaran dari hari ke hari.

Dalam laporan ini, *Eyes on the Forest* fokus pada dua hal sebagai contoh kasus bagaimana SMG / APP dan APRIL terus mengancam Cagar Biosfir UNESCO (Area 1) dan Semenanjung Kampar (Area 2). Analisis ini menggambarkan dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan ini mengulang pola yang sama di seluruh wilayah operasi gambut Riau: Kerumutan, Senepis dan Libo.

Eyes on the Forest menyesalkan bahwa diskusi REDD di Indonesia telah mengabaikan dampak iklim oleh industri kertas di negara ini begitu lama, menyebabkan kehancuran hebat dan mengakibatkan emisi karbon terus berlanjut.

Untungnya, Riau merupakan penyimpan besar gambut dan tempat hutan alam yang sumber daya karbon yang masih luas dan hal itu tidak terlalu terlambat untuk tindakan oleh Pemerintah lokal dan nasional dan komunitas iklim global.

Eyes on the Forest mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan moratorium terhadap semua operasi kedua perusahaan kertas itu guna memberikan waktu meninjau ulang operasi dan proses perizinan. Ini seharusnya diperintahkan dalam pengembangan strategi nasional REDD +.

Lahan gambut perusahaan-perusahaan yang akan terbuka untuk menebangi hutan alam dan menanam akasia pada akhirnya akan punah dalam beberapa dekade ke depan^{xvii} setelah mengeluarkan sejumlah gigaton CO₂ ke atmosfer^{xviii, xix}. Satu-satunya cara bagi SMG/APP dan APRIL untuk menghasilkan pulp untuk kertas berkelanjutan, adalah dengan menutup pengembangan perkebunan mereka pada lahan gambut dan menggeser operasi mereka ke kawasan tanah mineral yang tidak lagi memiliki tutupan hutan alam maupun nilai-nilai konservasi tinggi. Penebangan hutan alam di wilayah tanah mineral seperti Bukit Tigapuluh tidak bisa dianggap berkelanjutan dalam kondisi apapun. Bukit Tigapuluh telah menjadi pusat pasokan kayu teratas untuk SMG/APP yang tanpa henti-hentinya sedang dibuka oleh perusahaan. Eyes on the Forest akan melaporkan itu dalam laporan berikutnya.

Kasus-kasus yang disigi EoF dalam laporan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kampanye humas dari dua perusahaan itu didasarkan pada kebohongan dan bukan fakta. Pernyataan palsu luar biasa seperti klaim SMG/APP bahwa "dikombinasikan dengan penyerapan karbon dari perkebunan akasia, maka jejak karbon APP hampir netral^{xx}" muncul di dalam penilaian jejak karbon dimana perusahaan menugaskan Environmental Resource Management Indonesia^{xxi}. SMG/APP melaporkan kepada ERM bahwa mereka tidak menggunakan kayu alam dalam produksi mereka dan karena itu ERM mengecualikan emisi dari hasil hutan alam dalam analisis itu.

EoF melaporkan berulang kali yang menunjukkan sejumlah besar kayu alam yang dijadikan pulp oleh perusahaan. Penilaian ERM juga mengabaikan semua emisi dari pembukaan gambut oleh SMG/APP di mana perusahaan menanam perkebunan yang oleh SMG/APP ingin dimasukkan dalam analisis penyimpanan karbon¹. Kajian ini merupakan cara khas SMG/APP melakukan bisnis, dengan menyewa kontraktor, memberikan mereka data-data tidak lengkap dan mempublikasikan data palsu dengan nama mereka. Hal yang khusus menarik, tapi tidak mengejutkan dalam kasus ini adalah bahwa SMG / APP menolak untuk memberikan kajian untuk semua pemeriksa dari pihak luar, ini secara jelas menyembunyikan kebohongan yang digunakan untuk menghasilkan data.

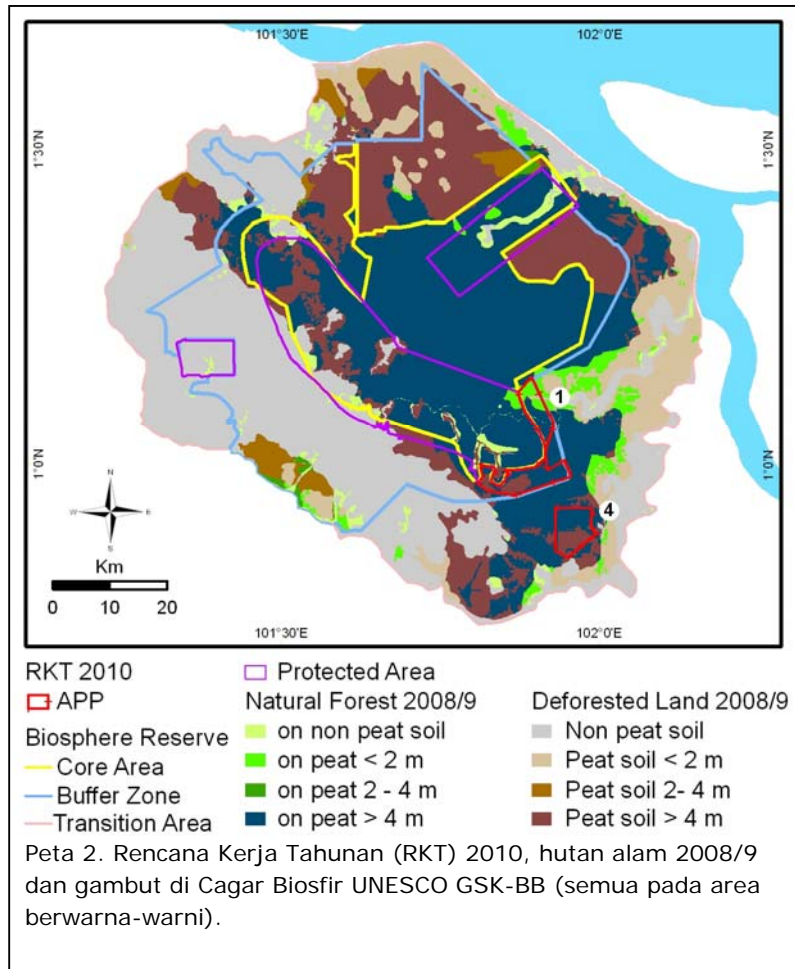
SMG/APP mengatakan: "pemasok fiber kayu pulp APP mengoperasikan perkebunan kayu akasia berdasarkan konsesi sah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada lahan yang diidentifikasi sebagai kawasan hutan dengan nilai terendah di negara ini, sebagian besar terdiri dari yang dikategorikan sebagai lahan rusak atau lahan terlantar. Sebelum lahan dikembangkan lahan itu dikenai sejumlah penilaian ekologis dan sosial untuk memastikan bahwa setiap area dari nilai-nilai konservasi tinggi diidentifikasi dan dilindungi.^{xxii}" Sekali lagi EoF menunjukkan contoh bahwa mereka membuka hutan alam yang dapat dikategorikan sebagai segala sesuatu yang mereka katakan mereka lindungi.

¹ Kajian ERM tidak meneliti emisi tata Ruang, perubahan tata ruang dan kehutanan study (LULUCF) namun hanya memeriksa sequestrasi oleh perkebunan. ERM menyatakan, "*Pada 2006 kayu-kayu bagi dua pabrik olah pulp utamanya dipasok dari perkebunan di Riau untuk Indah Kiat Pulp di Perawang dan dari perkebunan di Jambi dan Sumatera Selatan untuk pabrik Lontar Papyrus. [...] Untuk menentukan Carbon Footprint dari pabrik olah tersebut, hanya sequestrasi oleh perkebunan di Jambi, Sumatera Selatan dan Riau yang dianggap dalam keseimbangan karbon. Karena perkebunan Jambi dan Sumatera Selatan memasok kayu untuk pabrik Lontar Papyrus yang sama, nilai sequestrasi mereka digabung.*"

SMG / APP dan APRIL juga telah mempromosikan mitos bahwa penanaman pohon akasia memberikan kontribusi untuk mitigasi perubahan iklim. Tidak hanya perusahaan melakukan kontribusi besar terhadap perubahan iklim dengan memabat hutan alam rimbon dengan kandungan karbon yang tinggi untuk membuat perkebunan mereka, mereka juga terus-menerus melepaskan sejumlah besar emisi gas rumah kaca ke atmosfer oleh operasi perkebunan mereka. Selain itu, semua karbon yang disimpan oleh pertumbuhan pohon-pohon akasia akan dilepas kembali ke atmosfer sewaktu pohon-pohon itu dipanen, dijadikan pulp, berubah menjadi kertas, dijual dan dibuang oleh pelanggan untuk dibakar atau membusuk.

Area 1: Cagar Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil-Bukit Batu

konsesi: PT. Balai Kayang Mandiri (No. 1, afiliasi SMG / APP), PT Rimba Mandau Lestari (No. 4, afiliasi SMG / APP)

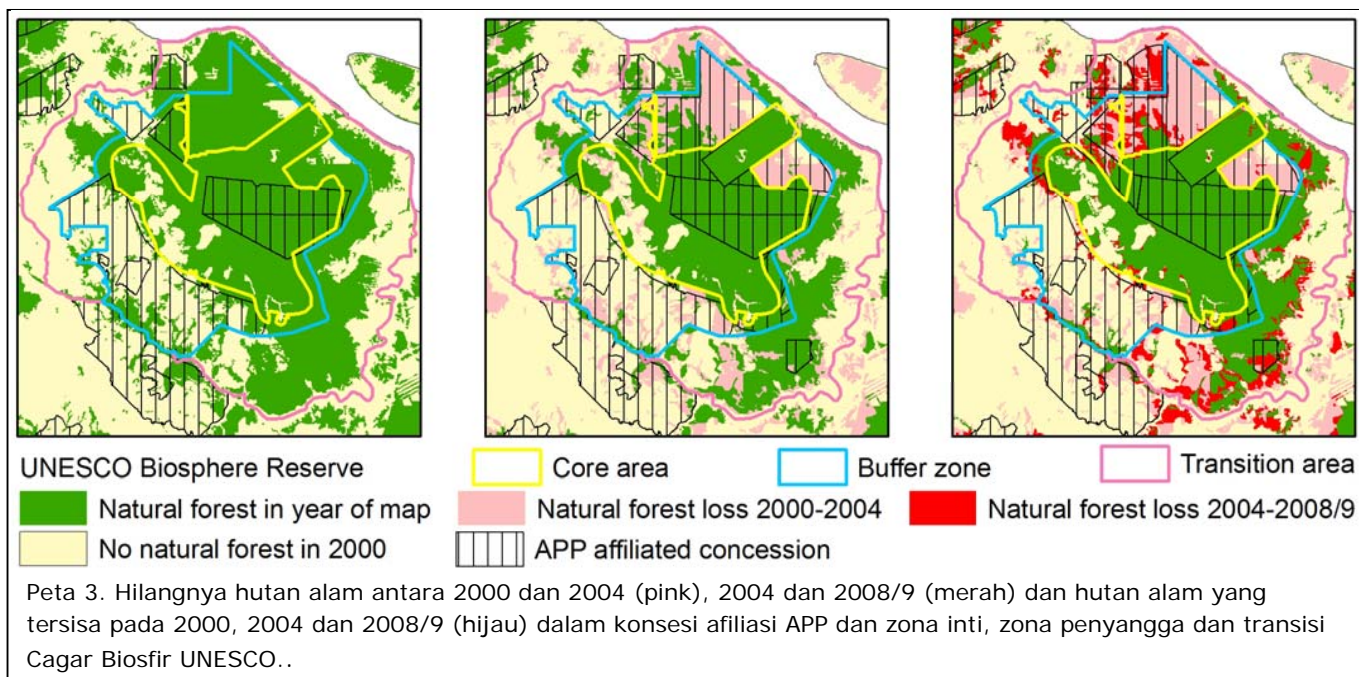


Nilai yang Terancam Nilai yang Terancam Dua konsesi dan semua hutan alam segera dibabat habis ini terletak di lahan gambut, kebanyakan > 4m dalamnya pada Cagar Manusia dan Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSK-BB)^{xxiii}. Cagar tersebut dibagi menjadi Kawasan Inti, Zona Penyangga dan Kawasan Transisi. Dua konsesi terletak pada Zona Penyangga dan Kawasan Transisi (Peta 2).

Cagar Biosphere ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebuah studi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa Cagar Biosphere adalah rumah bagi 150 spesies burung; 10 jenis mamalia, termasuk harimau Sumatera yang sangat terancam punah dan gajah Sumatera yang terancam punah; 8 jenis reptil; dan 52 spesies tanaman langka dan dilindungi^{xxiv}.

Cagar tersebut juga berisi hutan alam gambut menyatu ketiga terbesar yang masih tersisa di provinsi Riau, dengan cadangan karbon gambut yang terbesar. SMG / APP mengiklankan bahwa "*Cagar GSK-BB juga dinobatkan menjadi salah satu dari pilot proyek Pengurangan Emisi karena Deforestasi dan Degradasi (REDD) di Indonesia yang pertama, berfungsi sebagai waduk karbon utama*"^{xxv}.

Dampak negatif SMG / APP terhadap Cagar Biosfir UNESCO SMG / APP dengan bangga telah mengiklankan Cagar Biosphere UNESCO ini sebagai salah satu dari "program konservasi flagship-nya"^{xxvi}. Pada kenyataannya, Eyes on the Forest menyimpulkan bahwa SMG/APP secara mantap sedang membunuh Cagar Biosfir dan berkontribusi bagi emisi karbon yang besar bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan afiliasi SMG/APP, dengan menyediakan akses lebih mudah untuk hutan alam, telah berkontribusi bagi penebangan liar dan perambahan di dalam lansekap GSK/BB.



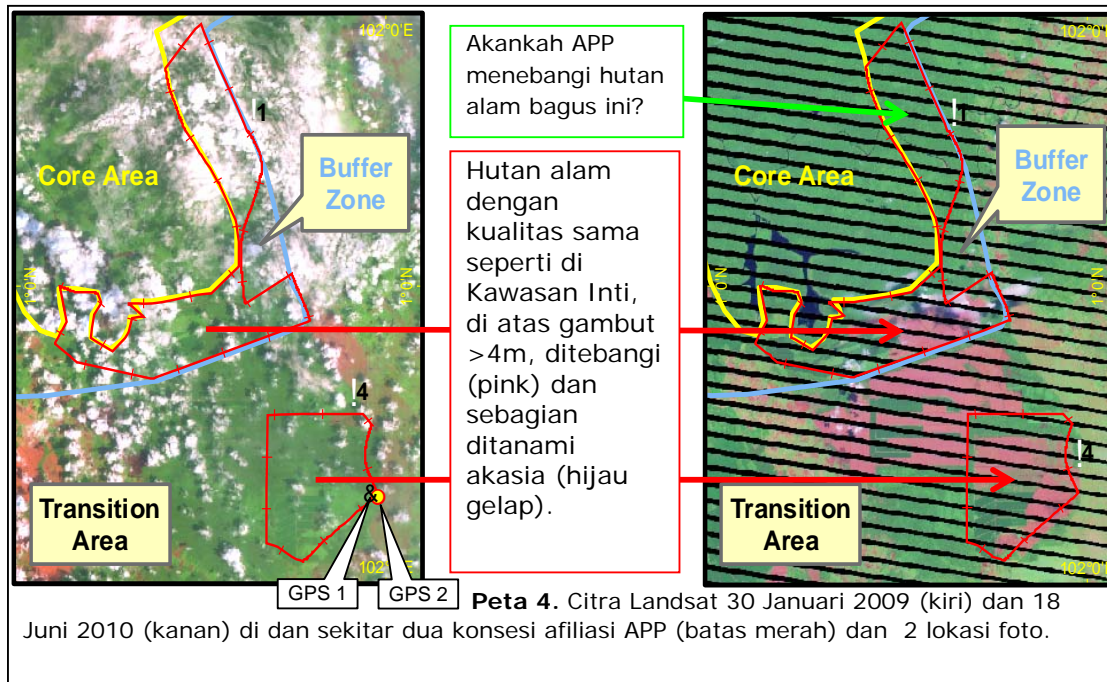
Mitra-mitra perusahaan SMG / APP memulai pertama yang diduga secara tidak sah menebangi hutan alam di lahan gambut di daerah yang saat ini adalah Zona Penyangga Cagar Biosfir sebelum tahun 2000 tanpa perizinan yang pantas dari Departemen Kehutanan. Mereka telah membuka sebagian besar hutan alam di dalam daerah yang saat ini jadi Zona Penyangga hingga 2004^{xxvii} (daerah merah muda dalam Peta 3). Pada tahun itu, setelah mendapat tekanan yang kuat dari LSM dan para pembeli, SMG/APP berkomitmen melindungi 72.060 hektar hutan alam yang tersisa di dalam konsesi afiliasi mereka^{xxviii, xxix}. Namun pada kenyataannya, SMG / APP diminta melindungi

sebagian besar hutan-hutan di kawasan ini dalam hal apapun karena hutan-hutan itu dilindungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP Riau 1994) sebagai "Hutan Lindung". Akibatnya, ini bukanlah anugerah bagi konservasi. Ini adalah janji untuk tidak menebangi hutan lindung secara ilegal.

Sejak itu, SMG / APP telah mengintensifkan kampanye humasnya tentang "kontribusi konservasi mereka" bagi kawasan GSK-BB sambil terus membuka lebih banyak hutan alam untuk produksi pulp dan kawasan ini semakin kehilangan hutan alam akibat pembalakan liar dan perambahan (area merah di Peta 3) .

Pada tahun 2005, SMG / APP menyewa SmartWood untuk memantau pengelolaan HCVF oleh SMG / APP di konsesi-konsesi afiliasinya di Kawasan GSK-BB, Semenanjung Kampar (Wilayah 2) dan Kerumutan selama lima tahun^{xxx}. Namun, SmartWood membatalkan kontrak pada tahun 2007 karena "temuan dari verifikasi audit dengan jelas menunjukkan kepada Rainforest Alliance bahwa upaya yang dilakukan oleh APP tidak cukup untuk mengelola dan melindungi HCVF"^{xxxi} .

Pada tahun 2009, UNESCO akhirnya mengesahkan sebuah Cagar Biosfir di sekitar blok konsesi SMG / APP di hutan lahan gambut GSK di Riau^{xxxii}. Namun laporan investigasi EoF bulan Juli^{xxxiii} menunjukkan bahwa dua perusahaan afiliasi SMG / APP (No. 1 dan No. 4) terus menebangi hutan bahkan di blok sisa terakhir hutan alam di Zona Penyangga Cagar Biosfir dan Daerah Transisi berdasarkan lisensi tahun 2009, tak lama setelah UNESCO menyetujui cagar tersebut.



Semua hutan alam ditebangi berada di lahan yang dilindungi pemerintah yaitu lahan gambut kedalaman > 4m. Hutan alam ditebangi tidak "di kawasan hutan yang nilai konservasinya terendah di negeri ini, sebagian besar terdiri dari apa yang dikategorikan sebagai lahan rusak atau lahan terlantar" ^{xxxiv} seperti halnya SMG / APP mengklaim secara luar biasa, tapi mereka sama bagusnya dengan hutan-hutan di dalam Kawasan Inti (Peta 4).

Izin-izin RKT 2010 memungkinkan dua perusahaan yang sama untuk menebangi beberapa ribu hektar hutan alam berada pada lahan gambut dalam Zona Penyangga dan Daerah Transisi, beberapa dari mereka berkedalaman > 4 meter. Eyes on the Forest menghimbau SMG / APP untuk menghentikan semua penebangan hutan alam dan pembukaan gambut di dalam batas-batas Cagar Biosfir UNESCO, baik di dalam Zona Inti atau di luar.

Semua penebangan hutan alam (Foto 1) dan terus

menerus menggali gambut dalam lahan gambut (Foto 2, 3) untuk menanam akasia; mengabaikan fakta ilmiah yang ditetapkan bahwa tidak mungkin memiliki pelepasan emisi bukan karbon dan akasia yang berkelanjutan di lahan gambut. ^{xxxv, xxxvi, xxxvii} Ditambah dengan perambahan dan kebakaran lahan gambut yang mana perusahaan SMG / APP tidak mampu menghentikannya di musim kering ^{xxxviii}. SMG/APP sedang membunuh ekosistem gambut GSK yang menyebabkan emisi karbon cukup besar, meningkatnya setiap tahun kawasan rusak dan gambut yang digali. WWF menyarankan agar UNESCO membentuk satu tim internasional untuk mengevaluasi dampak operasi SMG / APP di Cagar Biosfir UNESCO.

Apakah pembabatan hutan alam di zona penyangga Cagar Biosfir UNESCO dan penggalian gambut yang dalam di sepanjang batas Kawasan Inti cagar UNESCO dengan dampak kehancuran dan agaknya mematikan hutan alam di dalam Kawasan Inti merupakan pengelolaan rutin yang dapat diterima UNESCO? Kapan UNESCO mempertimbangkan penggunaan logonya oleh perusahaan dengan promosi *greenwashing* soal cagar yang tidak dapat diterima itu?

Di awal November 2010, Asral Rachman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menerima uang suap dari perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Bagian dakwaan adalah izin penebangan tahunan yang ia keluarkan kepada mitra SMG/APP, PT Balai Kayang Mandiri (konsesi No.1 di GSK dan di Kampar, lihat bab selanjutnya) serta PT Rimba Mandau Lestari (konsesi No.4) ^{xxxix}.

Seekor harimau Sumatera diyakini telah menerkam hingga tewas seorang petani sawit di salah satu konsesi mitra APP (PT Sakato Pratama Makmur) di dalam zona penyangga Cagar Biosfir UNESCO pada 20 September 2010. Harimau itu kemudian ditangkap dengan kaki terluka dan ia akhirnya tewas pada 30 September karena sebab yang masih belum jelas ^{xl, xli}.



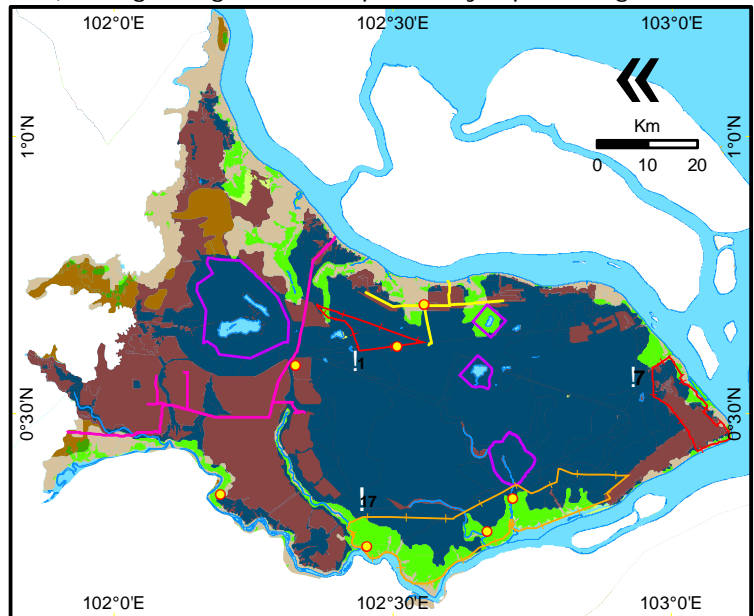
Foto 1 (kiri): Penebangan hutan alam berskala besar, dimana hutan alam jauh di baliknya merupakan konsesi nomor 4 (GPS 1: N0°53'23.4"; E101°59'28.4"). **Foto 2 (kanan atas):** Pembukaan kanal yang berbatasan hutan alam di konsesi no.4 (GPS 2:

N0°53'15.6"; E101°59'42.7"). **Foto 3 (kanan bawah).** Pembukaan kanal yang dalam dan luas di area tebangan dalam konsesi no.4 (GPS 1: N0°53'23.4"; E101°59'28.4").

Area 2: Semenanjung Kampar

Tiga konsesi : PT Balai Kayang Mandiri (no.1, afiliasi SMG/APP), PT Satria Perkasa Agung Serapung (no.7, afiliasi SMG / APP), PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (no. 17, anak perusahaan APRIL)

Nilai yang Terancam Konsesi itu dan semua hutan alam yang akan ditebangi terletak di gambut, sebagian besar dengan kedalaman lebih dari 4 meter (Peta A), dan dalam Prioritas Daerah Lanskap Konservasi Harimau yang diakui secara internasional^{xlii}. Tropenbos, yang dikontrak oleh APRIL untuk melakukan penilaian HCV, menyatakan berdasarkan konsultasi publik Mei 2010 bahwa semua hutan alam yang tersisa di Kampar adalah HC VF^{xliii}. Riau memiliki karbon gambut saham terbesar (14,6 Gt tahun 2002)^{xliv} di Indonesia. Sekitar 65% dari gambut Riau kehilangan hutan alam yang mencakup kurun 2008/2009^{xlv}. Meskipun Semenanjung Kampar dan Kerumutan berdekatan (Area 3) daerah tersebut masih memiliki tutupan hutan alam yang tinggi (Foto 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan gambar satelit di Peta 6, 7) dan gudang karbon dapat menyimpan dengan mudah.

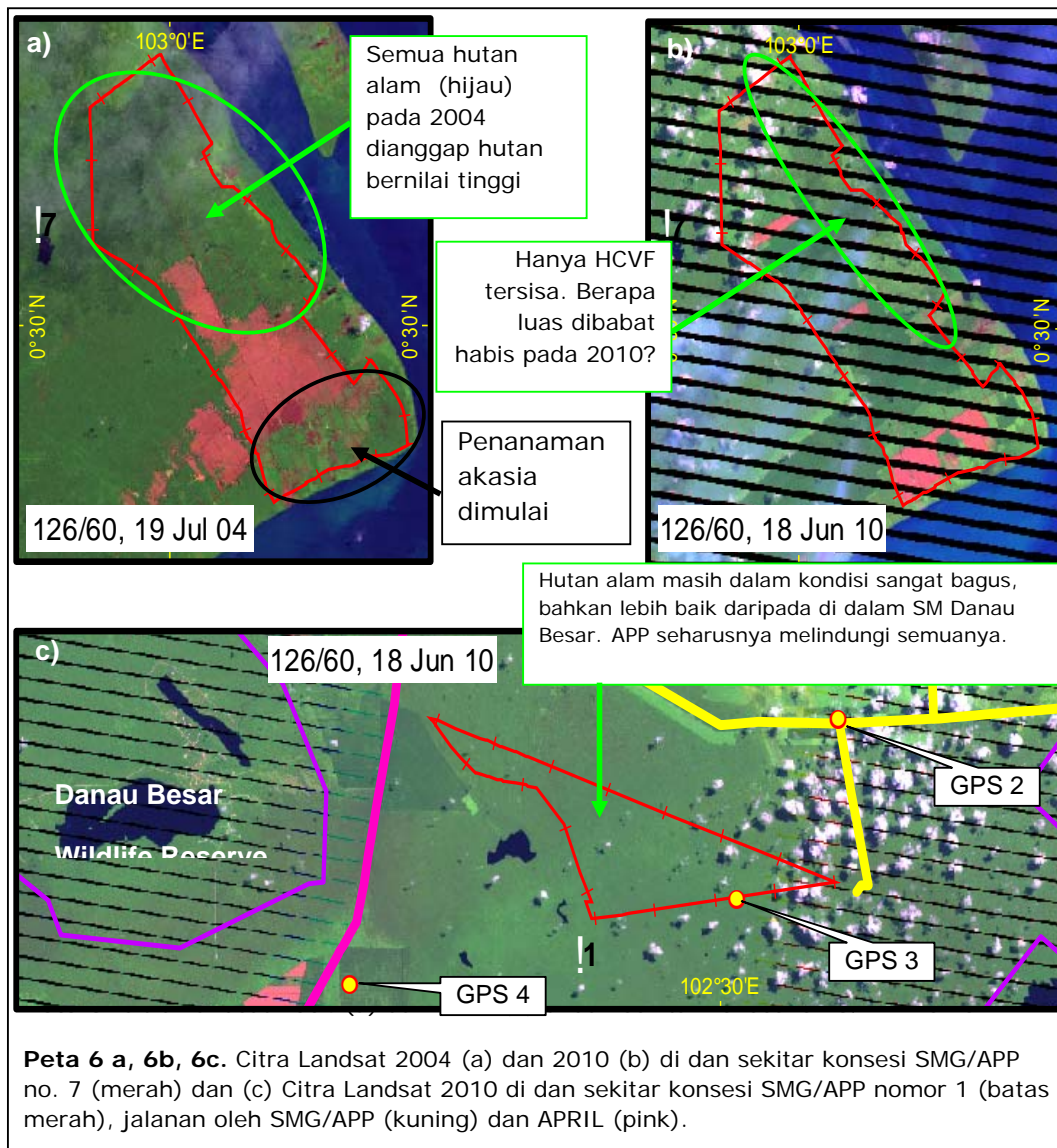


RKT 2010	Protected Area	Photo Location
APP	Natural Forest 2008/9	Deforested Land 2008/9
APRIL	on non peat soil	Non peat soil
Logging Road	on peat < 2 m	Peat soil < 2 m
APP	on peat 2 - 4 m	Peat soil 2- 4 m
APRIL	on peat > 4 m	Peat soil > 4 m

Peta 5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010, hutan alam 2008/9 dan gambut di Semenanjung Kampar.



Foto 4. Hutan alam di dalam konsesi APRIL no. 17 (GPS 1: N0°20'54.01";)



membatalkan kontrak pada tahun 2007 karena kegagalan SMG / APP untuk melindungi HCVF^{lv}. Konsesi ini telah diselidiki untuk dugaan pembalakan liar antara 2007 dan 2008, tetapi dibebaskan di tengah situasi yang masih dipertanyakan pada tahun 2009^{lvii}. Perusahaan memulai kembali pembukaan hutan alam berdasarkan izin RKT 2009^{lviii} meskipun fakta mengatakan (mantan) Bupati yang telah mengeluarkan izin tersebut dipenjara karena dakwaan korupsi sewaktu mengeluarkan izin^{lix}. Dengan izin baru 2010 yang memungkinkan

LSM lokal dan internasional telah banyak meminta pemerintah dan perusahaan untuk sepenuhnya melindungi hutan alam dan gambut Semenanjung Kampar untuk iklim global^{xlvi, xlvii, xlviii, xlix, l, li}. Semenanjung ini dan sekitar Kerumutan yang bersebelahan mencakup 1,7 juta hektar gambut yang dalamnya bahkan mencapai sekitar 20 meter^{lii}, yang masih relatif baik dan hutan alam yang besar dan berdekatan, kesemuanya kurang dari 800.000 hektar pada tahun 2008/9^{liii}. Penelitian awal oleh WWF Indonesia menunjukkan bahwa langkah menuju arah "no" emisi di Kampar–Kerumutan, gambut dalam lansekap yang mungkin bisa memberikan kontribusi lebih dari 50% bagi sasaran Indonesia dalam mengurangi 26% dari emisi gas rumah kaca.

Dampak negatif SMG / APP di Kampar Mitra SMG / APP telah membuka wilayah besar hutan alam di Kampar sejak tahun 2003.

SmartWood ditugaskan oleh SMG / APP untuk melakukan penilaian HCVF di konsesi PT. Satria Perkasa Agung Serapung (No. 7) dan menyimpulkan bahwa semua hutan alam yang tersisa pada tahun 2004 (sekitar 7.000 ha) adalah HCVF^{liv} (dilingkari hijau daerah di Peta 6a).

SMG/APP setuju untuk melindungi HCVF dan menyewa SmartWood pada tahun 2005 untuk memantau pengelolaan HCVF^{lv} SMG/APP. Namun, SmartWood

pembukaan 1.822 hektar hutan, yang tampaknya sebagian besar HCVF asli akan dibabat habis (Peta 6b). Eyes on the Forest menghimbau SMG/APP untuk menghentikan penebangan HCVF.



Selain itu, mitra SMG / APP telah merusak hidrologi gambut yang rentan pada ekosistem gambut Semenanjung Kampar keseluruhan dengan cara membangun jalan logging yang secara hukum dipertanyakan keabsahannya, dengan kanal dalam pada kedua sisi sejak tahun 2005 untuk mencapai konsesi PT. Balai Kayang Mandiri (No. 1^{ix}, garis kuning Peta 5, Gambar 5). Perusahaan afiliasi SMG / APP memperoleh izin RKT tahun 2009 dan 2010 untuk tiga blok konsesi di Riau termasuk yang satu ini di Semenanjung Kampar, namun, citra Landsat 18 Juni 2010 belum menunjukkan tanda pembukaan hutan (Peta 6c). Hutan di daerah ini masih utuh karena belum ada akses ke wilayah ini sebelum jalan ini dibangun (Foto 6).

Eyes on the Forest menghimbau kepada SMG / APP untuk membongkar jalan logging mereka, menutup bukaan kanal dan tidak melaksanakan izin manapun mereka miliki di Semenanjung Kampar.



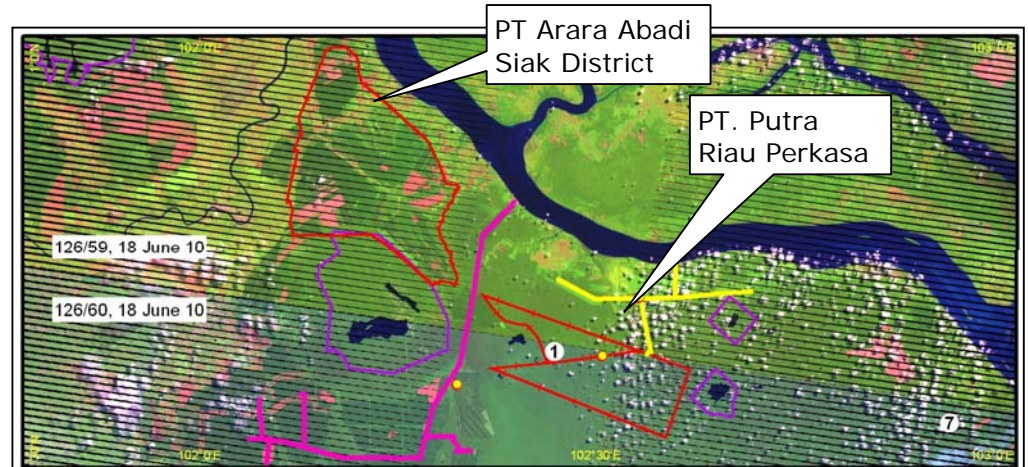
Foto 5 (kiri atas). Jalan logging SMG/APP, membuka pusat kubah gambut Semenanjung Kampar tanpa tujuan 'jelas' (GPS 2: N0° 41' 48.051"; E102° 33' 19.354" © Marcel Silvius).
Foto 6 (kanan atas). Hutan alam di jantung Semenanjung Kampar, di perbatasan konsesi

nomor 1 (GPS 3: N0°37'19.77"; E102°30'28.43").

Awal Oktober 2010, SMG/APP dan Carbon Conservation mengumumkan "Cagar Karbon Kampar" (Kampar Carbon Reserve) sebagai bagian proyek REDD-plus^{xi}, dengan mengklaim bahwa mereka bisa menciptakan kredit REDD-plus dengan tanpa menebangi namun melindungi hutan alam di dalam konsesi mitra APP, PT Putra Riau Perkasa (PRP), yang bersambungan dengan konsesi PT Balai Kayang Mandiri (Nomor 1 pada Peta 6c dan 6d).

Eyes on the Forest menganggap bahwa ini adalah akal-akalan karbon-hutan lainnya oleh SMG/APP setelah laporan carbon footprint yang ditulisnya bersama ERM^{xii}. EoF yakin tidak ada kredit REDD-Plus dikeluarkan atau dibeli untuk proyek ini karena:

- Konsesi ini berada pada puncak gambut paling dalam, yang lebih daripada 4 meter kedalamannya - PRP/APP tidak dibolehkan menebangi hutan ini berdasarkan undang-undang dengan alasan apapun.
- Melindungi lahan gambut kecil ini, sekitar 15.000 hektar di tengah-tengah kubah gambut raksasa seputaran 700.000 hektar gambut menyatu Semenanjung Kampar adalah tak masuk akal dengan proyek REDD-plus karena:
 - Gambut di kawasan konsesi PT PRP akan terus mengemisi sejumlah besar karbon bahkan jika hutan alam di dalamnya tidak ditebangi, selagi (1) gambut itu masih dibuka terus oleh jalan logging APP/SMG dan dua sisi bukaan kanal; (2) APP meneruskan operasi penebangan dan pembukaan kanal pada hutan gambut menyatu Kampar seperti dijelaskan di atas dan pada konsesi Distrik Siak (Peta 6d); (3) APRIL meneruskan aktivitas-aktivitasnya seperti dijelaskan di bawah bagian ini, dan (4) jika APP membuka lahan gambut dan menebangi hutan alam di konsesi sebelahnya, PT Balai Kayang Mandiri (Nomor 1). Proyek konservasi gambut yang hanya layak harus ada pada tingkat lansekap, mengurus eko-hidrologi ekosistem gambut sempurna.
 - PRP adalah bagian dari rencana pasokan kayu APP/SMG dan perusahaan ini akan menebangi hutan-hutan lainnya sebagai kompensasi atas kerugian yang mengakibatkan "kebocoran perusahaan" di tempat lainnya dalam operasi global mereka.



Peta 6d. Citra satelit 18 Juni 2006 dalam dan sekitar konsesi SMG/APP PT. Balai Kayang Mandiri (No.1), PT. Putra Riau Perkasa dan konsesi APP di Distrik Siak serta jalanan SMG/APP (*kuning*) dan APRIL (*pink*) di Semenanjung Kampar.

SMG/APP menjelaskan ancaman bagi proyek ini sebagai berikut: "akar sejati isu-isu lingkungan Indonesia: kemiskinan pada masyarakat asli di sekitar hutan hujan." Pada kenyataannya, konsesi ini terletak pada gambut sangat dalam di wilayah terpencil, bagian tengah Semenanjung Kampar. Satu-satunya ancaman yang ada sejauh ini terhadap lahan dan hutan gambut pada jalan APP tersebut dan bukaan kanal serta ancaman penebangan hutan alam ilegal oleh APP di kawasan ini. Citra satelit Juni 2010 menunjukkan bahwa konsesi ini sepenuhnya ditutupi oleh hutan alam yang bagus tanpa adanya tanda perambahan. Bagaimanapun, jalanan itu bisa memudahkan terjadinya perambahan kapanpun masanya (Peta 6d).

Eyes on the Forest mengimbau APP tidak hanya melindungi hutan alam di konsesi PRP, namun juga (1) tidak lagi menebangi hutan alam di konsesi PT. Balai Kayang Mandiri atau konsesi-konsesi lainnya di Semenanjung Kampar atau di wilayah lainnya, (2) segera menutup

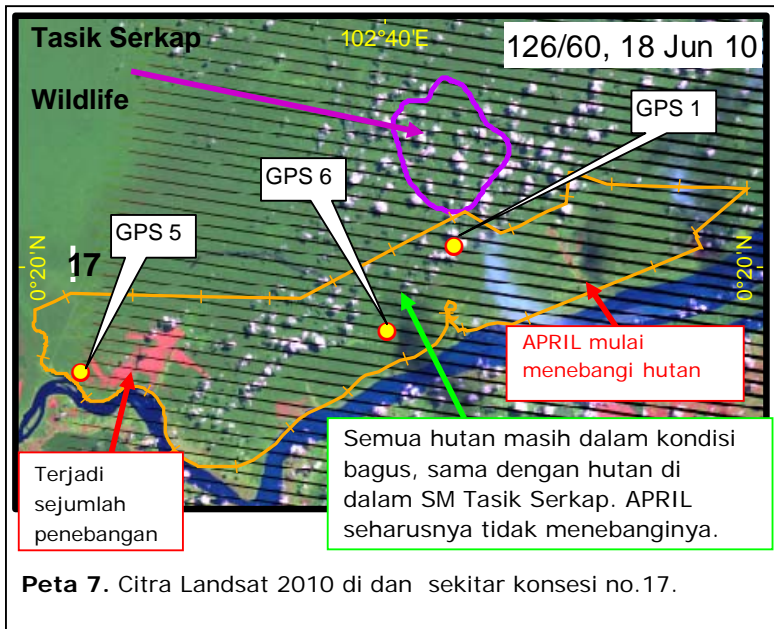
jalan logging dan memblok kanal gambut yang dibuka guna merehabilitasi gambut dan hutan alam sepanjang wilayah ini serta (3) menghentikan pembukaan gambut yang merusak dan tak terkelola baik serta memperbaiki hutan alam di semua konsesi lainnya milik

kelompok perusahaan ini di Semenanjung Kampar. Dengan mempromosikan perlindungan PRP sebagai proyek REDD-Plus dengan kondisi seperti disebutkan di atas, maka APP tengah mengolok-olok keseluruhan upaya REDD-Plus Indonesia.

Dampak Negatif APRIL di Kampar Perusahaan afiliasi APRIL telah membuka wilayah besar hutan alam di Kampar sejak tahun 1999 dan membangun sebuah jalan logging yang merusak di tahun 2004 yang memisahkan ekosistem gambut semenanjung Kampar menjadi setengah ^{ixiii} (garis merah muda di Peta 5, Peta 6d, Foto 7).

Baru-baru ini, APRIL sangat bergantung pada kayu hutan alam dari Semenanjung Kampar untuk memproduksi pulp. Izin RKT tahun 2009 memperbolehkan PT RAPP untuk membabat 19.286 hektar hutan alam di dua blok konsesi (No.17 di Peta 7 dan yang lainnya di utara) untuk menghasilkan 2,2 juta meter kubik MTH, 25% dari total panen RKT ^{ixiv}. Lisensi RKT 2010 memungkinkan APRIL untuk membabat tambahan 21.799 ha hutan alam di konsesi No.17 (45.317 ha) untuk menghasilkan 2,2 juta meter kubik MTH lainnya, 35% dari total panen RKT.

Hingga Juni 2010, APRIL beroperasi di dua wilayah (Peta 7, Foto 8), meskipun telah menyadari sedikit yang diusulkan untuk panen MTH, kemungkinan karena Eyes on the Forest menghimbau pada APRIL untuk menghentikan semua drainase gambut dan konversi hutan alam (yang semuanya HCVF) di konsesi ini.



protes besar oleh LSM. Hutan alam di konsesi ini masih dalam kondisi sangat baik (Foto 4, 8, 9). Eyes on the Forest menghimbau pada APRIL untuk menghentikan semua drainase gambut dan konversi hutan alam (yang semuanya HCVF) di konsesi ini.



Foto 7 (kiri). Jalan buatan APRIL membelah Sem. Kampar jadi setengah (19 Mei 2010, GPS 4: N0°35'11.79"; E102°19'28.87").

Foto 8 (kanan). Penebangan hutan dan bukaan kanal dimulai di konsesi no.17 (19 Mei 2010, GPS 5: N0°15'40.36"; E102°27'11.70").





Foto 9 (kiri). Hutan alam yang belum ditebang di dalam konsesi APRIL no.17 (19 Mei 2010, GPS 6: N0°17'19.83"; E102°40'7.08"). bisakah hutan ini diselamatkan sehingga tidak akan tampak seperti Foto 10 di bawah ini?

Garis gelap tipis ini adalah contoh tipikal apa yang dinamakan "koridor satwaliar" yang oleh APRIL diberitahukan ke dunia apa yang mereka sebut "mozaik perkebunan". Padahal sabuk-sabuk ini hanyalah beberapa ratus meter lebarnya atau kurang dan kebanyakan mati meranggas dengan cepat atau lambat akibat efek pengeringan di perkebunan perbatasannya.

Foto 10 (kanan). Perkebunan besar akasia ini ada di dalam konsesi perusahaan afiliasi APRIL lainnya di Sem. Kampar, yakni PT. Selaras Abadi Utama (19 Mei 2010, GPS 7: N0°21'18.75"; E102°11'28.60").

Lansekap hancur ini ada pada perkebunan akasia di dalam tahapan pertumbuhan awalnya. Tidak ada satwaliar mampu hidup di sini, tidak ada hewan yang bisa dimangsa harimau. Dan skenario ini akan berulang sendiri setiap 4-6 tahun hingga area permanen digenangi air laut akibat subsidensi (penurunan permukaan) gambut. Ini akan jadi ujung pasokan kayu perusahaan dan itu artinya akan ada lebih banyak surat pengajuan perusahaan kepada investor dan Pemerintah guna meminta hutan lagi untuk dibabat.



Himbauan Eyes on the Forest

Mengingat komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi hutan dan gambut, permintaan kuat global saat ini untuk produk lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, dan berkurangnya habitat bagi spesies kritis terancam punah di Indonesia yang pernah ada:

Eyes on the Forest menyambut baik komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulai suatu penghentian selama dua tahun untuk semua konsesi baru bagi konversi gambut dan hutan alam antara 2011 dan 2013, yang telah didokumentasikan dalam letter of intent ditandatangani pemerintah Norwegia dan Indonesia di Oslo pada tanggal 26 Mei. EoF pun meminta moratorium untuk segera dilaksanakan, dan untuk diperluas agar mencakup konversi hutan alam dan drainase gambut di semua konsesi yang ada.

Eyes on the Forest menghimbau pada SMG / APP dan APRIL untuk:

- Tidak merusak reputasi Presiden kita dan menghentikan kegiatan usaha seperti biasa dan benar-benar tidak berkelanjutan.
- Segera berhenti menggunakan kayu yang terkait dengan konversi hutan hujan tropis dan pembukaan lahan gambut.
- Secara khusus mengembangkan perkebunan baru yang disebut "lahan kritis" pada lahan bukan gambut, yang telah lama rusak dan daerah yang tidak digunakan secara komersial, setelah menyelesaikan isu kepemilikan tanah dan memperoleh sertifikat tanah yang sah.
- Berhenti memperluas pabrik pulp lagi atau membangun yang baru sampai pasokan kayu perkebunan menghasilkan umur yang cukup dan berkelanjutan dan terjamin dimana tidak ada hutan tropis sedikitpun yang telah dikonversi dan tidak ada lahan gambut yang digali.

Eyes on the Forest menyerukan kepada mitra usaha SMG/APP dan APRIL untuk secara cermat meneliti iklan perusahaan itu dan tidak mempercayai saja klaim berkelanjutan mereka.

Eyes on the Forest menghimbau kepada UNESCO untuk mengevaluasi penggalian gambut dan penebangan hutan di Cagar GSK dan meminta SMG/APP untuk menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut di mana saja di Cagar Biosfir dan seluruh operasi mereka.

Eyes on the Forest menyerukan kepada Kementerian Kehutanan untuk:

- Mendukung Presiden kita dan memudahkannya berhasil dengan komitmennya untuk mengatasi emisi GRK di negara ini.
- Menahan semua lisensi dan izin yang ada dan menunda semua penerbitan izin RKT baru sampai KPK, polisi dan satuan tugas Presiden telah menyelesaikan penyelidikan mereka terhadap kesalahan yang dilakukan para pejabat yang menerbitkan izin. Setiap hutan yang hilang akibat dari penerbitan lisensi yang tidak wajar dan tidak dapat dikembalikan lagi maka hal demikian haruslah dihindari.
- Mengevaluasi legalitas dan keberlanjutan semua lisensi dan izin yang diberikan kepada semua perusahaan yang berafiliasi dengan SMG/ APP dan APRIL dan perusahaan hutan tanaman industri lainnya.
- Mencabut surat keputusan tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 yang terus membolehkan penebangan hutan alam dan pembukaan lahan gambut, termasuk untuk konsesi PT RAPP di Semenanjung Kampar yang pernah dinyatakan oleh Menteri Kehutanan untuk dihentikan operasinya.

- Bekerja sama dengan bagian lain dari pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kepedulian soal hak ulayat, penerbitan izin, dan promosi pembangunan yang disebut “lahan telantar” yang telah rusak hutannya dan tidak digunakan secara komersial.

Eyes on the Forest meyakini bahwa dengan hamper 3,2 juta hektar lahan tidak berhutan, yang tampaknya tidak digunakan secara komersial, atau “lahan telantar” pada lahan bukan gambut di Sumatra Sumatra saja^{ixv}, menghentikan konversi hutan alam dan drainase gambut tidaklah berarti memperlambat pembangunan di Indonesia. Sebaliknya itu berarti keuntungan dari sumber daya lahan yang belum dimanfaatkan, ditambah keuntungan dari komoditas baru yang baru muncul di Negara ini, yakni karbon, yang dihasilkan dengan menghentikan penggundulan hutan, membiarkan hutan yang ada menyimpan karbon dan menghentikan emisi dari pembukaan lahan gambut.

SEKIAN

For further information, please contact:

Editor Eyes on the Forest

Afdhal Mahyuddin

Email: eof@eyesontheforest.or.id

ⁱ The Jakarta Post (7 June 2010) Guest Speaker: Moratorium on natural forests, peat not prompted by Oslo grant: Forestry Minister. <http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/07/guest-speaker-moratorium-natural-forests-peat-not-prompted-oslo-grant-forestry-minis>

ⁱⁱ Office of the Prime Minister, Norway (26 May 2010) Norway and Indonesia in partnership to reduce emissions from deforestation. (<http://www.regjeringen.no/en/dep/smk/press-center/Press-releases/2010/Norway-and-Indonesia-in-partnership-to-reduce-emissions-from-deforestation.html?id=605709>), Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation.” http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia_avtale.pdf

ⁱⁱⁱ Eyes on the Forest (8 July 2010) Press Release: Business as Usual in Riau, Sumatra: Pulp Industry Undermines Indonesian President’s Historic Commitment to Dramatic GHG Emissions Reductions. http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=1

^{iv} Eyes on the Forest (8 July 2010) Investigative Report: Business as Usual in Riau, Sumatra: Pulp Industry Continues Clearance of Natural Forest. http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=182&Itemid=20

^v Photo Gallery of Evidences:

APP (1): http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=1

APP (2): http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=1

APRIL (1): http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=1

APRIL (2): http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=1

^{vi} Eyes on the Forest (April 2010) Investigative Report December 2009. Two Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group associated companies continue clearcutting of deep peatland forest of Kerumutan in Riau

Province, Sumatra, threatening peatland forest ecosystems, Sumatra tiger and global climate http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=1

^{vii} The Jakarta Post (7 June 2010)

^{viii} Bappenas, Republic of Indonesia (December 2009) Reducing carbon emissions from Indonesia’s peat lands. Interim Report of a Multi-Disciplinary Study. Presented at Wetlands International Side Event, 11 December 2009, COP 15, Copenhagen, Denmark. <http://www.wetlands.org/Portals/0/Presentations/3-Wetland%20side%20event%20peatland%20presentation%20111209.ppt>

^{ix} WWF Indonesia data, unpublished. Riau province had 2,566,630 ha of natural forest in 2008/9. 2009 RKTs allowed clearance of 130,758 ha of forest, making the forest cover 2,435,872 ha. 112,914 ha of natural forest clearance would be 4.6% of this.

^x Bappenas, Republic of Indonesia (December 2009) Reducing carbon emissions from Indonesia's peat lands. Interim Report of a Multi-Disciplinary Study. Presented at Wetlands International Side Event, 11 December 2009, COP 15, Copenhagen, Denmark. <http://www.wetlands.org/Portals/0/Presentations/3-Wetland%20side%20event%20peatland%20presentation%20111209.ppt>

^{xi} Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf, and E. Wikramanayake. (2006) Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF.

^{xii} Mongabay.com (18 November 2010) Scientists call upon Indonesia to recognize value of secondary forests. http://news.mongabay.com/2010/1118-letter_norway_indonesia.html

^{xiii} Eyes on the Forest (April 2010)

^{xiv} Eyes on the Forest (8 July 2010)

^{xv} Greenpeace (23 November 2010) Protection Money. How industry expansion plans would use climate funds to bankroll deforestation and undermine President Susilo Bambang Yudhoyono's commitment to low-carbon development. <http://www.greenpeace.org/seasia/PageFiles/209584/Protection-Money.pdf>

^{xvi} WWF-Indonesia (2006) Riau Elephants 2006 Tragedy. http://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/where_we_work/tessonilobukittigapuluh/focal_species/elephants/elephant_tragedy/

^{xvii} Rieley, J.O. & S.E. Page (2008) Carbon Budgets under Different Land Uses on Tropical Peatland. Included in: Rieley, J.O., Banks, C.J. and Page, S.E. (2008) Future of Tropical Peatlands in Southeast Asia as Carbon Pools and Sinks. Papers Presented at the Special Session on Tropical Peatlands at the 13th International Peat Congress, Tullamore, Ireland, 10th June 2008, CARBOPEAT Partnership, International Peat Society and University of Leicester, United Kingdom.

http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/tullamorepapers/ipc_tropical_peat_special_session.pdf

^{xviii} Bappenas, Republic of Indonesia (December 2009)

^{xix} Uryu, Y., Mott, C., Foad, N., Yulianto, K., Budiman, A., Setiabudi, Takakai, F., Nursamsu, Sunarto, Purastuti, E., Fadhli, N., Hutajulu, C.M.B., Jaenicke, J., Hatano, R., Siegert, F. and M. Stüwe (2008) Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO₂ Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. WWF Indonesia Technical Report, Jakarta, Indonesia.

<http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2008/WWFPresitem7596.html>

^{xx} <http://www.asiapulppaper.com> "Tackling Climate Change" under Sustainability & CSR section, viewed on 3 August 2010.

^{xxi} Environmental Resource Assessment (8 August 2008) Asia Pulp & Paper – Indonesia. Executive Summary of APP's Carbon Footprint Assessment.

^{xxii} <http://www.asiapulppaper.com> "Tackling Climate Change" under Sustainability & CSR section, viewed on 3 August 2010.

^{xxiii} UNESCO Giam Siak Kecil – Bukit Batu, Indonesia. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=45450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

^{xxiv} UNESCO (1 December 2009) UNESCO Awards Indonesian Institutions that Contributed to the Development of the Giam Siak Kecil – Bukit Batu (GSK-BB) Biosphere Reserve in Riau Province.

http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=11938&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

^{xxv} Asia Pulp & Paper (17 March 2009) Stakeholder Update: Taking the Lead in Major Conservation Initiative; First of its Kind for Forestry Industry in South East Asia.

^{xxvi} Asia Pulp & Paper CNN International Advertorials (December 2009) "Conservation"

<http://www.youtube.com/watch?v=rEyduROW8Sk>

^{xxvii} See FACT 3 and FACT 8 in WWF-Indonesia (October 2010) WWF Monitoring Brief October 2006: Asia Pulp & Paper (APP) Hiding Destruction behind False Advertisements: APP continues to ignore calls for conservation beyond "legal compliance", and even fails on the latter.

http://www.wwf.or.jp/activities/lib/pdf/APP_Oct06_MonitoringRpt.pdf

^{xxviii} Jarvie, J., Jeyaraj, K. and Hardiono, M. (Nov 2003)

^{xxix} Asia Pulp & Paper (2004) Sustainability Action Plan.

^{xxx} Asia Pulp & Paper (25 August 2005) Press Release: APP & Rainforest Alliance Sign Landmark Agreement to Monitor Conservation of Biodiversity. <http://www.illegal->

logging.info/item_single.php?it_id=1006&it=news

^{xxx} Rainforest Alliance/SmartWood Program (January 2007) Public Statement: Termination of Contract to Verify High Conservation Value Forests (HCVF) for APP in Sumatra, Indonesia. <http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/app.pdf> See also SmartWood (28 April 2006) Forest Management High Conservation Value Forest (HCVF) Public Summary Verification Report of: Bukit Batu Forest Management Unit Sinar Mas Forestry/ Asia Pulp & Paper, Riau Province, Sumatra, Indonesia.

^{xxxii} Asia Pulp & Paper (16 June 2009) Stakeholder Update: First-ever Industry Proposed Biosphere Reserve Approved by International UNESCO MAB Committee.

^{xxxiii} **Eyes on the Forest (8 July 2010) PR and Report.**

^{xxxiv} <http://www.asiapulppaper.com> "Tackling Climate Change" under Sustainability & CSR section, viewed on 3 August 2010.

^{xxxv} Rieley, J.O. & S.E. Page (2008) Carbon Budgets under Different Land Uses on Tropical Peatland. Included in: Rieley, J.O., Banks, C.J. and Page, S.E. (2008) Future of Tropical Peatlands in Southeast Asia as Carbon Pools and Sinks. Papers Presented at the Special Session on Tropical Peatlands at the 13th International Peat Congress, Tullamore, Ireland, 10th June 2008, CARBOPEAT Partnership, International Peat Society and University of Leicester, United Kingdom. (http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/tullamorepapers/ipc_tropical_peat_special_session.pdf)

^{xxxvi} Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S. (2006) PEAT-CO₂, assessment of CO₂ emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics report Q3943. <http://www.wldelft.nl/cons/area/rbm/PEAT-CO2.pdf>

^{xxxvii} Hooijer, A., Page, S., Silvius, M., Kwadijk, J., Wösten, H. and J. Jauhiainen. (2010) Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences* 7: 1-10.

^{xxxviii} Eyes on the Forest (27 July 2009) Press Release: Fires in APP/Sinar Mas Concessions Add to Region's Haze Woes, Threaten New UN Biosphere Reserve.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39

^{xxxix} Eyes on the Forest (10 November 2010) EoF News: More Riau official sentenced for forestry graft case. http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=1

^{xl} Eyes on the Forest (23 September 2010) EoF News: Farmer dies attacked by tiger inside APP's pulpwood concession.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=1

^{xli} Eyes on the Forest (6 October 2010) EoF News: Sumatran tiger's leg broken, then trapped and die.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=1

^{xlii} Sanderson et al. (2006)

^{xliii} Tropenbos HCV Full Assessment of the Kampar Peninsula BICC-6 May 2010. Public consultation, 6 May 2010.

^{xliv} Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / *Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera*, 1990 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).

^{xlv} Wahyunto et al. (2003) and WWF Indonesia (2010)

^{xlvi} Jikalahari (December 2005) Usulan Peningkatan Status Kawasan Semenanjung Kampar (Landscape Siak-Kampar) Sebagai Taman Nasional. (Proposal to upgrade Siak-Kampar Landscape's area status to National Park.)

^{xlvii} WWF-Indonesia (February 2006) Overview of the Status of Natural Forests in Kuala Kampar, Riau, Sumatra, Indonesia: Proposed Expansion of the Peninsula's Existing Conservation Areas. Submitted to the Indonesian Ministry of Forestry.

^{xlviii} Jikalahari & WWF Indonesia (24 May 2007) Press Release: Stop conversion in Kampar Peninsula as it incites climate change.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=84&itemid=20

Jikalahari & WWF-Indonesia (22 May 2007) Press Release: Jikalahari, Universitas Riau dan Masyarakat Semenanjung Kampar: Stop Konversi Semenanjung Kampar karena Memicu Perubahan Iklim.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=85

^{xlx} Jikalahari & Greenpeace (6 May 2010) Open Letter to APRIL.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=6

ⁱ Greenpeace (15 July 2010) Greenpeace Halts Rainforest Destruction in Kampar Again by Pulp and Paper Giant APRIL. <http://www.greenpeace.org/usa/press-center/releases2/greenpeace-halts-rainforest-de>

ⁱⁱ Eyes on the Forest (26 July 2010) EoF News: Riau NGOs file legal notice to Forest Ministry. http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=6

ⁱⁱⁱ Jikalahari & WWF Indonesia (22 May 2007)

ⁱⁱⁱⁱ WWF Indonesia (2010)

^{liv} Rainforest Alliance SmartWood Program (4 February 2005) High Conservation Value Forest (HCVF) Assessment Report for: Serapung Unit PT. Arara Abadi, Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group. <http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/SmartWood%20HCVF%20Serapung%20Final%202005.pdf>

^{lv} Asia Pulp & Paper (25 August 2005) Press Release: APP & Rainforest Alliance Sign Landmark Agreement to Monitor Conservation of Biodiversity. http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1006&it=news

^{lvi} Rainforest Alliance/SmartWood Program (January 2007) Public Statement: Termination of Contract to Verify High Conservation Value Forests (HCVF) for APP in Sumatra, Indonesia. <http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/app.pdf>

^{lvii} Eyes on the Forest (April 2010)

^{lviii} **Eyes on the Forest (8 July 2010) PR and Report.**

^{lix} Eyes on the Forest (April 2010)

^{ix} Eyes on the Forest (26 March 2008) Press Release: New APP Logging Road Threatens One of World's Biggest Carbon-Storing Forests, Tigers.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=39 Eyes on the Forest (26 March 2008) Investigative Report. Eyes on the Forest to Asia Pulp & Paper: Cease all destruction of one of the world's largest tropical peatland forests – Kampar peninsula in Riau, Sumatra, Indonesia.

http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=100&Itemid=20

^{lxi} Business Wire (3 December 2010) Carbon Conservation and APP introduce the World's First Pulpwood Plantation to Carbon Reserve REDD-Plus Initiative. <http://www.businesswire.com/news/home/20101003005120/en/Carbon-Conservation-APP-Introduce-World%E2%80%99s-Pulpwood-Plantation>

^{lxii} Environmental Resource Assessment (8 August 2008)

^{lxiii} Eyes on the Forest (27 May 2005) News: APRIL's New Road Threatens Natural Forest in Kampar Peninsula. http://eyesontheforest.or.id/eofnew/eof_news_may272005.pdf

^{lxiv} Eyes on the Forest (July 2010)

^{lxv} WWF Indonesia (2010)